

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
TERPADU GUNUNG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH :
NABEEL EDGAR FERDRIANDA
NIM/BP : 21042316/2021

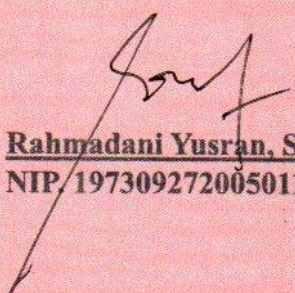
**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata
Terpadu Gunung Padang
Nama : Nabeel Edgar Ferdrianda
TM/NIM : 2021/21042316
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2025
Disetujui oleh
Pembimbing



Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si
NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 05 November 2025 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung

Padang

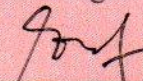
Nama : Nabeel Edgar Ferdrianda
TM/NIM : 2021/21042316
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2025

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si
Anggota	: Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM.
Anggota	: Putri Febri Wialdi, M.A.P.

Tanda Tangan

1.	
2.	
3.	

Mengesahkan

Dekan FIS UNP


Afriva Khafdir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabeel Edgar Ferdrianda
TM/NIM : 2021/21042316
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 November 2025
Saya yang menyatakan



Nabeel Edgar Ferdrianda
NIM. 21042316

ABSTRAK

**Nabeel Edgar Ferdrianda (21042316) : Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan Wisata
Terpadu Gunung Padang**

Pembimbing : Rahmadani Yusran,S.sos,M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan. Meskipun kebijakan ini telah memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan pariwisata daerah, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas penunjang, promosi wisata yang belum terkoordinasi, serta minimnya sumber daya manusia di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola kawasan, masyarakat sekitar, pelaku UMKM, serta pengunjung wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung (toilet, area parkir, dan tempat sampah), serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang kuat, komitmen pemerintah daerah, dan stabilitas sosial-politik yang kondusif, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

Kata kunci: Implementasi, Pengembangan Wisata, Gunung Padang, Kota Padang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini

5. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM. selaku Dosen Penguji I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Putri Febri Wialdi, M.A.P. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Bapak Diko Riva Utama, S. STP., M.M. selaku Kabid Destinasi dan Daya Tarik pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Padang yang telah membantu memberikan data demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Tri Pria Anugrah, S.STP selaku Staf Dinas Pariwisata Kota Padang yang telah membantu memberikan data demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Dewi Pengelola di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Bapak Hijrah Saputra Petugas Kebersihan (DLH) yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Masyarakat yang berada di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang menjadi informan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Bapak/Ibu Pedagang UMKM yang berada di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang menjadi informan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak/Ibu Pengunjung yang berada di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang menjadi informan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teristimewa dan terutama kedua orang tua penulis yakni Papa saya yang tercinta Ferminandes dan pintu surgaku Mama Eva Meindri Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan do'a-do'anya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
15. Teristimewa juga kepada abang kandung penulis, Evandri Fernandes dan Rofiq Muhammad Ferdri Terima kasih sudah meluangkan waktu, menjadi mentor maupun saudara yang memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada teman – teman seperjuangan dari Departemen Ilmu Administrasi Negara 2021, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Nabeel Edgar Ferdrianda. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali

merasa sudah putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, walaupun terlambat memulai perjalanan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, tidak lelah mencoba, dan tetap pada jalannya sendiri. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, bel. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna hingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca. Aamiin.

Padang, November 2025

Nabeel Edgar Ferdrianda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Kajian Penelitian yang Relavan	37
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Informan Penelitian	49
E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	51
G. Uji Keabsahan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Temuan Umum.....	56
1. Kota Padang	56
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Padang.....	61
B. Temuan Khusus.....	75
1. Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.....	75

2.	Permasalahan	97
3.	Variabel yang Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	109
C.	Pembahasan.....	118
1.	Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.....	118
2.	Variabel yang Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.....	133
BAB V PENUTUP		137
A.	Kesimpulan	137
B.	Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....		141
LAMPIRAN		146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gunung Padang	5
Gambar 2. 1 Model Pendekatan The Policy Implementation Process	32
Gambar 2. 2 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation	33
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Penelitian	47
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Struktur Dinas Pariwisata Kota Padang.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 Tarif Masuk Objek Wisata	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Sistem pembayaran digital di Kawasan Wisata Gunung Padang	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Gunung Padang	6
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	50
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Padang.....	58
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan.....	59
Tabel 4. 3 Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Wisata Gunung Padang Dinas Pariwisata Kota Padang	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada dasarnya memiliki ragam potensi wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Menurut Wahid (2015) Pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal disuatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor yakni salah satunya pariwisata. Pariwisata berperan besar dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempat tujuan wisata, dan yang nanti akan tumbuhnya usaha kecil menengah sebagai wujud nyata kontribusi sektor pariwisata dalam membangun masyarakat yang Sejahtera (Hariadi B dkk,2023).

Kebijakan pada pengembangan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pengembangan Pariwisata di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkenalkan budaya dan banga, dan memperkuat persatuan nasional melalui pariwisata berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Undang – Undang ini mengatur hak dan kewajiban wisatawan serta pelaku usaha, kewenangan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi, serta jenis-jenis usaha pariwisata seperti akomodasi, transportasi wisata, dan jasa pramuwisata.

Pelaksanaan kebijakan pariwisata di Indonesia memiliki berbagai kendala, antara lain: Pertama, di Destinasi Wisata Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Bali ketidakteraturan dan kurangnya sistem tata kelola pengelolaan wisatawan yang ditandai dengan pola perjalanan wisatawan yang belum terorganisasi secara sistematis serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelola terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. (Dianasari dkk, 2020).

Kedua, di Kampung Wisata Dago Pojok kondisi fasilitas penunjang dan infrastruktur yang masih kurang optimal dan belum memadai untuk mendukung jumlah pengunjung yang terus meningkat, termasuk fasilitas utama seperti pintu gerbang, pusat informasi, pos keamanan, papan petunjuk, toilet, dan area parkir yang masih dalam kondisi kurang baik maupun belum lengkap. Selain itu, akses jalan dan fasilitas umum lainnya seperti tempat istirahat dan penitipan barang juga memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi standar dan standar kebutuhan wisatawan (Ramadhana B dkk 2020).

Ketiga, di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur minimnya pengembangan atraksi wisata akibat keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal karena kurangnya pelatihan dan kesadaran wisata, sulitnya akses menuju lokasi wisata karena kondisi geografis berupa gugusan pulau, ketidakteraturan tata ruang yang menyebabkan Pembangunan tidak tertata, serta ketidaksesuaian visi antara pemerintah pusat yang berorientasi pada pemerintah daerah yang mengedepankan ekowisata berbasis Masyarakat (Sugiarto A dkk 2020).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata, sektor unggulan untuk dikembangkan di Sumatera Barat karena adanya dukungan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan kekhasan lain yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor ini menjadi salah satu penggerak perekonomian dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Sumatera Barat, baik yang berasal dari Sumatera Barat, luar provinsi hingga mancanegara (Nusera Q, 2023).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2014–2025 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Perda ini menetapkan strategi pengembangan sektor pariwisata melalui empat pilar utama, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan, serta menetapkan kawasan prioritas seperti Kota Padang, Bukittinggi, Geopark Ngarai Sianok-Maninjau, Sawahlunto, dan Kepulauan Mentawai. RIPPDA ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas destinasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional yang berbasis budaya, alam, dan nilai-nilai lokal.

Namun, penerapan pilar-pilar ini masih menghadapi permasalahan di berbagai lokasi wisata unggulan, termasuk kawasan Geopark Ngarai Sianok dan

Puncak Gagoan. Persoalan yang dihadapi umumnya mencakup minimnya fasilitas, lemahnya kapasitas SDM, promosi yang belum optimal, hingga rendahnya kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat lokal. Sebagai contoh di Ngarai Sianok Kota Bukittinggi, belum optimalnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau, Kota Bukittinggi, masih diperlukan perhatian lebih dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati seperti bunga *Rafflesia Arnoldi* agar tidak rusak akibat aktivitas wisata. Pariwisata bersifat musiman sehingga berdampak pada ketidakstabilan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelayanan terhadap wisatawan masih perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan belum merata, sehingga diperlukan pembinaan dan keterlibatan aktif masyarakat secara lebih konsisten (Fadisa N 2022). Dan yang terakhir Objek Wisata Puncak Gagoan Kabupaten Solok yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan objek wisata Puncak Gagoan, meskipun memiliki potensi alam yang besar dan menarik. Fasilitas dan prasarana wisata yang masih sangat terbatas (hanya tersedia satu toilet dan mushola yang letaknya jauh), akses jalan yang belum memadai dan rusak, promosi wisata yang belum tersentuh media modern (masih sebatas dari mulut ke mulut), serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, minimnya keterlibatan swasta (Yolvery Y dkk 2023).



Gambar 1. 1 Gunung Padang

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Kawasan Gunung Padang di Kota Padang merupakan salah satu destinasi wisata potensial yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan alam yang kuat. Melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021, kawasan ini ditetapkan sebagai daya tarik wisata unggulan. Namun, berbagai persoalan faktual yang terungkap melalui observasi lapangan dan hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara arah kebijakan dengan kondisi riil. Fasilitas penunjang yang belum memadai, promosi wisata yang tidak terkoordinasi, serta keterbatasan SDM dalam pengelolaan destinasi menjadi hambatan nyata bagi pengembangan Gunung Padang sebagai kawasan wisata terpadu yang kompetitif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan kawasan terpadu Gunung Padang ini. Sejak adanya perwako ini pada tahun 2021 Pemerintah Kota Padang terus melakukan pengembangan Kawasan Wisata Gunung padang dengan penyediaan fasilitas penunjang wisata, perbaikan infrastruktur, promosi, serta kemitraan dengan pelaku pariwisata. Langkah strategis ini memiliki dampak yang cukup seperti meningkatnya aktivitas ekonomi lokal seperti UMKM, homestay, serta pemandu

wisata, munculnya apresiasi terhadap potensi Sejarah dan budaya Kawasan serta peningkatan kesadaran Masyarakat lokal akan pentingnya menjaga Kawasan wisata (Khairani dkk, 2021).

Namun demikian, meskipun Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 telah menetapkan pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang sebagai daya tarik wisata unggulan, pada praktiknya masih terdapat ketimpangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan seperti berikut: pertama, fasilitas yang masih kurang atau tidak mendukung di kawasan wisata terpadu Gunung Padang, misalnya kondisi fisik tangga yang rusak dan membahayakan keselamatan pengunjung, minimnya akses air bersih di toilet umum, tempat parkir yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas pendukung yang layak padahal seluruh elemen tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Gunung Padang

NO	Tahun Kunjungan	Jumlah Kunjungan
1.	2016	25.400
2.	2017	23.100
3.	2018	44.956
4.	2019	31.449
5.	2020	12.140

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang

Kunjungan wisatawan ke Kawasan Wisata Gunung Padang Kota Padang mengalami kunjungan yang naik turun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 25.400 orang, kemudian

mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 23.100 orang. Namun, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 44.956 orang, yang menunjukkan adanya peningkatan minat wisatawan terhadap objek wisata ini.

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan kembali menurun menjadi 31.449 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor promosi yang kurang optimal serta adanya persaingan dengan destinasi wisata lain di Kota Padang. Kemudian pada tahun 2020, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu hanya 12.140 orang. Penurunan tajam ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk sektor pariwisata.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban “memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata” serta “mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat luas”. Dalam hal pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, kewajiban tersebut mencakup penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dasar yang menjadi kebutuhan utama wisatawan, seperti area parkir, toilet, akses jalan atau tangga menuju puncak, serta kebersihan lingkungan destinasi.

Hal ini juga dibuktikan pada observasi awal yang dilakukan pada bulan April 2025 terdapat beberapa permasalahan pada bagian fasilitas di Daya Tarik Wisata Gunung Padang. Pada saat penulis berkunjung ke Daya Tarik Wisata Gunung Padang, pada fasilitas pendukung yaitu tempat parkir yang disediakan tidak

mencukupi jumlah kendaraan wisatawan yang berkunjung, sehingga beberapa wisatawan yang berkunjung memarkir kendaraannya jauh dari gerbang masuk. Toilet yang juga tidak memadai seperti tidak adanya ketersediaannya air bersih. Tangga yang rusak dan tidak memadai untuk akses wisatawan menuju puncak gunung padang serta sampah yang berserakan di gerbang awal pintu masuk. Ketika penulis menuju puncak Daya Tarik Wisata Gunung Padang, penulis juga menemukan beberapa wisatawan kesulitan saat menaiki tangga menuju destinasi karena banyak nya tangga yang rusak dan tidak terawat.

Kedua, Pasal 29 huruf f menyatakan bahwa Dinas Pariwisata berwenang memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya berperan aktif merancang strategi promosi Gunung Padang yang lebih luas, misalnya melalui integrasi media sosial, platform digital resmi, dan kerja sama dengan industri pariwisata. Namun demikian promosi belum berjalan dengan maksimal di kawasan wisata terpadu Gunung Padang,

Hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh (Putri R dkk, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, promosi melalui media sosial masih dilakukan secara terbatas dan lebih banyak digerakkan oleh masyarakat secara mandiri, tanpa dukungan penuh atau strategi yang jelas dari pemerintah daerah. Akibatnya informasi tentang potensi wisata Gunung Padang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal tempat ini memiliki daya tarik alam, sejarah, dan budaya yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kurangnya promosi yang terencana ini membuat jumlah pengunjung belum sesuai harapan.

Berdasarkan penelitian Putri R. dkk. (2024), promosi destinasi wisata Gunung Padang melalui media sosial masih dilakukan secara terbatas, serta lebih banyak digerakkan oleh inisiatif masyarakat tanpa strategi terpadu dari pemerintah daerah. Akibatnya, informasi mengenai daya tarik wisata Gunung Padang yang kaya akan unsur alam, sejarah, dan budaya belum tersebar secara luas.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wahyuni dan Safitri (2022) yang menyatakan bahwa kurangnya penggunaan data dan analisis media digital menyebabkan strategi promosi destinasi wisata di daerah kurang efektif dan tidak mencapai target pasar yang diharapkan. Perumusan kebijakan promosi seharusnya didasarkan pada bukti nyata di lapangan, seperti data tren media sosial, perilaku wisatawan digital, serta efektivitas saluran promosi yang telah digunakan. Dengan mengandalkan bukti empiris, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan promosi yang lebih strategis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju.

Hal ini juga dibuktikan dalam wawancara awal penulis dengan salah satu masyarakat disekitar kawasan wisata terpadu Gunung Padang yaitu Bapak Samsurizal pada Kamis 8 Mei 2025, yang mengatakan:

“...Kalau dari pemerintah kota atau dinas pariwisata, promosi lewat media sosial memang belum terlalu terlihat ya. Selama ini yang banyak bantu mempromosikan itu anak-anak muda sekitar sini, lewat Instagram pribadi atau TikTok. Tapi itu pun belum terkoordinir. Harusnya ada bantuan pelatihan dari pemerintah bagaimana cara promosi yang benar, atau minimal ada akun resmi yang rutin aktif mengangkat potensi wisata Gunung Padang ini” (Wawancara pada 8 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa upaya promosi pariwisata Gunung Padang melalui media sosial belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini promosi digital lebih banyak dilakukan oleh

kalangan muda disekitar kawasa wisata melalui unggahan pribadi di media sosial. Namun promosi tersebut dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pemerintah belum ada pelatihan atau arahan resmi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai strategi promosi yang efektif. Bahkan akun resmi pemerintah untuk mempromosikan Gunung Padang secara rutin pun belum terlihat.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk “menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat secara langsung di lapangan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Padang, hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh (Hariadi B dkk, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, pengelolaan kawasan wisata terpadu Gunung Padang masih menghadapi kendala serius dalam hal keterbatasan tenaga kerja atau petugas di lapangan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Padang sebagaimana diungkapkan dalam kajian Hariadi B. dkk. (2023).

Salah satu informan yaitu Bapak Rian Saputra selaku staf objek wisata Gunung Padang pada Kamis 8 Mei 2025, yang mengatakan:

“...masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di lapangan sehingga pengelolaan objek wisata Gunung Padang kurang terkontrol oleh petugas, sehingga aktivitas pengunjung kurang diperhatikan karena keterbatasan personil di lapangan” (Wawancara 8 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut kondisi ini menyebabkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan wisata seperti pengawasan terhadap perilaku pengunjung, pemberian informasi dan pelayanan wisata, serta pengelolaan kebersihan dan keamanan kawasan menjadi tidak maksimal. Tidak hanya itu, kurangnya petugas juga berdampak pada tidak tersampainya edukasi budaya dan sejarah Gunung Padang kepada para wisatawan yang seharusnya menjadi salah satu nilai jual destinasi ini.

Lebih jauh, meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi budaya dan alam secara berkelanjutan, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelaksanaannya masih menunjukkan berbagai kesenjangan, seperti belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya lokal dalam atraksi wisata, kurangnya sarana promosi yang konsisten dan profesional untuk menarik wisatawan secara luas, serta terbatasnya dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar akibat minimnya pembinaan UMKM dan distribusi manfaat pariwisata yang belum merata (Khairani dkk, 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas yang masih kurang atau tidak mendukung di kawasan wisata terpadu Gunung Padang. Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
2. Promosi belum berjalan dengan maksimal di kawasan wisata terpadu Gunung Padang. Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Padang. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang?
2. Apa variabel yang pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.

2. Untuk menganalisis variabel pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian bidang Kebijakan Publik.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, dan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata Kota Padang pada Pengembangan Pariwisata Terpadu Gunung Padang sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata terpadu Gunung Padang.
 - c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.

secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kebijakan ini telah memiliki arah dan tujuan yang jelas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan. Tujuan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Gunung Padang sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan kebijakan ini telah didukung oleh sumber daya

yang cukup, baik dari sisi kelembagaan maupun sarana dan prasarana, meskipun jumlah petugas lapangan dan fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat sampah, dan area parkir masih terbatas sehingga pengawasan dan pelayanan terhadap pengunjung belum sepenuhnya optimal. Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai pelaksana utama telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terarah, serta menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya, walaupun koordinasi antarinstansi dan mekanisme pelaporan kegiatan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.

Sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugas, tetapi motivasi kerja sebagian petugas masih perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif dan pembinaan rutin. Komunikasi antarorganisasi dan antarpetugas juga telah terjalin, namun masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara berkala, sehingga penyampaian informasi dan tindak lanjut hasil kegiatan belum sepenuhnya efisien. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di sekitar kawasan wisata cukup mendukung pelaksanaan kebijakan. Masyarakat memiliki sikap positif terhadap pengembangan kawasan karena memberikan dampak ekonomi dan membuka peluang usaha baru, meskipun

kesadaran terhadap kebersihan dan ketertiban masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang telah menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata telah berupaya mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak keamanan kawasan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan agar permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Bagi Pengelola Kawasan Wisata Gunung Padang

Diharapkan dapat memperbaiki dan menambah fasilitas pendukung wisata, seperti tempat sampah, toilet umum, papan informasi, serta area parkir yang memadai. Pengelola juga diharapkan melakukan inovasi dalam promosi wisata melalui media digital dan kegiatan budaya agar daya tarik kawasan semakin meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dari aspek lain seperti evaluasi kebijakan, keberlanjutan lingkungan, atau pengaruh kebijakan terhadap peningkatan ekonomi lokal, dengan memperluas lokasi penelitian dan melibatkan lebih banyak informan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya., (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kab. Sukabumi: CV Jejak.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Aryani, J. (2019). *Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan*. 2, 20.
- Bovaird, T. dan E. Loffler (ed). (2005). *Public Management and Governance*. Rutledge.London. Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik* , Intermedia Jakarta.
- Campbell, J.P. (1989). *Teori Efektivitas, dalam Richard M. Efektivitas Organisasi* (2005). Bandung: Erlangga.
- Damanhuri E, Padmi T. *Teknologi Pengelolaan Sampah*. Penerbit ITB;2011.
- Harbani Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moh. Pabundu Tika. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sejati, K. (2009). *Pengolahan sampah terpadu*. Kanisius.
- Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wisnawa, I. M. B., Prayogi, P. A., & Sutapa, I. K. (2021). *Manajemen Pemasaran Pariwisata-Pengembangan Potensi Produk Wisata Perdesaan*. Deepublish.

Zulian Yamit. (2003). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

Jurnal

Adamy, Z. (2024). Implementation of Regional Government Regulation Policies Related to The Development of Super Priority Tourism Destinations Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah Terkait Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. *Mendapo: Journal ...*, 5, 329–347. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/36233%0Ahttps://mail.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/download/36233/20353>

Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>

Asmara, S. A., Padmaningrum, D., & Sugihardjo, S. (2024). Pariwisata berbasis Masyarakat (Community based Tourism) dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.19184/jtc.v8i1.42980>

Astutiningsih, S., Sutrisno, E., & Istania, R. (2024). Menuju Desa Wisata Bangkit: Implementasi Kebijakan Pemasaran Dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Komparatif Pada Desa Wisata Candirejo dan Karangrejo Kabupaten Magelang). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 1–30. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i2.794>

- Baswarani, D. T. (2021). Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pariwisata Berkualitas. *Warta Pariwisata*, 19(2), 12–13. <https://doi.org/10.5614/wpar.2021.19.2.04>
- Dianasari, D. A. M. L., Tirtawati, N. M., Liestiandre, H. K., Negarayana, I. B. P., & Saputra, I. G. G. (2020). Analisis pengelolaan wisatawan mancanegara di destinasi pariwisata Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Bali. *Jurnal Kepariwisata*, 19(1), 1-8.
- Fadisa, N., Syamsurizaldi, S., & Koeswara, H. (2022). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 73-78.
- FADHERA PUTRI, H. R., & ENDARTI, E. W. (2022). Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Asn Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tandes Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 29–43. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.115>
- Fatmawati, I. (2021). The Role of Teachers in Curriculum Development and Learning. *Revorma, Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 1(1), 20–37. <http://ejournal-revorma.sch.id>
- Feriyadin, Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. *Jurnal Magister Manajemen Unram*, 10(2), 130–142. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i2.640>
- Hariadi, B., & Meilina, S. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang. *JAPAN: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 123-130.
- Harmila Morika Tarigan, & Husni Thamrin. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung Silalahi Di Kabupaten Dairi. *Jurnal Niara*, 16(2), 379–390. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16265>
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68 86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Khairani, U., Yusiana, L. S., & Mayadewi, N. N. A. (2021). *Perencanaan lanskap untuk pengembangan wisata di Gunung Padang, Kota Padang, Sumatera Barat*. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 7(2), 173–182.
- Koroy, T. R., Fahrianta, R. Y., Bachtiar, Y., Daud, I., Nastiti, R., & Irawan, A. (2022). *Selatan Paska Pandemi Melalui Program Pariwisata Improving Tourism Market in South Kalimantan Province Post Pandemic Through Sustainable Tourism*

Program. 3(2), 50–55.

Maryam, & Junaidi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 05(01), 53–58.

NUSERA, Q. (2023). STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI PADANG DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT (Doctoral dissertation, IPDN).

Muliawaty, L., & Ilhami, R. (2022). Implementation of Sustainable Development Policies in Waste Management. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16602>

Putri, R., Ismi, A., Putri, R. Y., Yulasmi, & Putra, R. B. (2024). *Strategi promosi melalui media sosial untuk mengembangkan potensi pariwisata Gunung Padang*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JIM)*, Vol. XX(No. X), xx–xx. <https://jurnal.alungcipta.com/index.php/JIM/article/view/xxx>

Ramadhana, B., Rahardjo, P., & Wipranata, I. (2020). Penataan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok Bandung. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 1(2), 2313.

Ramadhani, G. C., & Sudibyo, D. P. (2024). *Evidence Based Policy Formulation dalam Perumusan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta (Studi Kasus Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari)*. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(2), 214–230.

Ritonga, A. R., Thamrin, M. H., Siahaan, H., Dalimunthe, M. A., & Nur'aini. (2024). Promotion of ecotourism and communication policy in increasing tourists in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–20. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4764>

Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>

Sarudin, R. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kampung Saungkuriang Kota Tangerang. *Jurnal Government (Kajian Kajian Politik, Hukum, dan Pemerintahan)*, 16(1), 43–52. <https://doi.org/10.34211/jgov.v16i1.3525>

Solihin, I., Jumanah, J., Nugroho, A., Cahyani, Y. D., Auladatisyifa, I. R., & Herdiana, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasca Pandemic di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 186–204. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.186-204.2023>

- Sugiarto, A., & Mahagangga, I. G. A. O. (2020). Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi kasus komponen produk pariwisata). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(2), 18-25.
- Supriyadi, E., Iha, H. H., Djamil, A., & Dharma, P. (2018). Analysis of community based tourism development to increase SME performance and welfare level. Case study in West Sumatra. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 9(5 (29)), 1077-1084.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 455–488.
- Wibowo, M. S., Paninggiran, H. N. K., & Heptanti, U. (2023). Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 4(2), 158–168. <https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.458>
- Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Kajian teoretis dan empiris. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(1), 1-11.
- Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16(1), 35–44. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>